

## PUTUSAN PSBB PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PANDEMIC COVID-19 TH. 2020 MELALUI PENDEKATAN *HUMAN SECURITY* DAN MAQOSHID

Willi Ashadi  
Ari Nugroho Kartika Nasution  
Devina Floreansia  
Ahmad Priansyah

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia  
[153201302@uii.ac.id](mailto:153201302@uii.ac.id)

---

DOI : 10.55656/kisj.v4i1.78

Disubmit: (20-04-2022) | Direvisi: (14-02-2022) | Disetujui: (02-04-2022)

---

### ABSTRAK

Persebaran Pandemi Covid-19 terjadi di berbagai negara di dunia pada tahun 2020. Hal tersebut tentu membuat pemerintah dunia mengambil langkah untuk merespon wabah covid 19. Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan persebaran pandemi salah satunya dengan menerapkan kebijakan *lockdown* di beberapa negara seperti Singapura, Russia, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan hingga Indonesia. Kebijakan lock down yang diambil menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Human security merupakan salah satu pendekatan keamanan non-tradisional yang digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan bagi kehidupan masyarakat di suatu negara dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, politik, lingkungan, makanan, individu dan komunitas. Islam memiliki pendekatan serupa yang dikenal sebagai maqoshid syari'ah yang mencakup unsur agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan besarnya dampak yang ditimbulkan *lockdown* di berbagai negara dunia, sehingga pemerintah dunia perlu memperhatikan poin-poin human security dan maqoshid syari'ah untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi.

Kata kunci: *Human Security*, maqasid syariah, covid-19, PSBB.

### ABSTRACT

The spread of the Covid-19 pandemic will occur in various countries in the world in 2020. This certainly makes the world's governments take steps to respond to the covid 19. Various ways have been taken to stop the spread of the pandemic, one of which is by implementing lock down policies in several countries such as Singapore, Russia, the People's Republic of China, South Korea and Indonesia. The lock down policy that was taken caused various problems in the social life of the community, especially in the economic field. Human security is a non-traditional security approach that is used to see the impact of a policy on people's lives in a country by considering aspects of health, economy, politics, environment, food, individuals and communities. Islam has a similar approach known as maqoshid syari'ah which includes points of religion, soul, mind, property and descent. With the magnitude of the impact caused by lockdowns in various countries of the world, the world government needs to pay attention to points of human security and maqoshid syari'ah to minimize the bad effects that occur.

Keywords: *Human Security*, maqoshid syari'ah, covid-19, lockdown.

## PENDAHULUAN

*World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan adanya situasi darurat terhadap kesehatan global atas timbulnya penyakit baru yaitu virus korona yang dikenal dengan nama resminya adalah COVID-19. Berdasarkan WHO per tanggal 23 April 2020 menyebutkan sejauh ini telah tercatat 2,549,632 kasus COVID-19 di seluruh dunia dan telah menewaskan lebih dari 175,825 orang di seluruh dunia menurut WHO (WHO, 2020).

Virus ini Bermula pada 31 Desember tahun 2019, Tiongkok menyampaikan kepada WHO dan dunia Internasional terkait adanya beberapa kasus pneumonia yang cukup aneh dan kasus tersebut terjadi di Wuhan, ibu kota dari provinsi Hubei. Wuhan adalah sebuah kota pelabuhan yang memiliki penduduk sekitar 11 juta orang, Wuhan sendiri terletak di provinsi Hubei. Pada awalnya virus korona tersebut belum teridentifikasi. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada 5 Januari 2020 Para pemimpin Tiongkok mengesampingkan adanya potensi bahwa virus ini merupakan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit tersebut berasal dari Tiongkok dan telah membunuh lebih dari 770 orang di seluruh dunia pada 2002-2003. Pada 7 Januari 2020 para pemimpin WHO mempublikasikan bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi adanya virus baru. Virus tersebut bernama 2019-nCoV dan telah diidentifikasi sebagai virus yang masuk kedalam keluarga *coronavirus*, yang juga termasuk dalam keluarga tersebut meliputi SARS dan flu biasa (Aljazeera,2020).

Perkembangan virus korona hari berganti hari semakin mewabah dan meluas. Banyak masyarakat Wuhan di provinsi Hubei terjangkit virus korona. *Trend* dan *chart* virus korona yang membuat manusia terpapar semakin meningkat setiap harinya. Tidak hanya di Wuhan, virus korona menyebar di beberapa negara dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan rilis dari WHO per april 2020, ada 204 negara yang sudah terpapar virus korona (covid-19) (Kompas, 2020). Kondisi tersebut membuat beberapa negara panic dan mencari solusi untuk memutuskan mata rantai virus korona tersebut.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setiap negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia sudah mengeluarkan berbagai macam cara. Di Kolombia misalnya, dimana masyarakat diizinkan meninggalkan rumah tergantung pada nomor kartu identitas nasional warganya. Sementara itu di Serbia menggunakan istilah "*dogwalking hour*". Adapun di Belarus, presiden menerapkan kebijakan untuk menentang saran dari pihak medis, dan merekomendasikan vodka dan sauna sebagai cara untuk tetap aman dari COVID-19 ini.

Dibelahan negara lain ada yang menggunakan pendekatan yang lebih umum yaitu pemerintah mengeluarkan adanya rekomendasi tentang jarak sosial (*social distancing*) untuk sebagian atau seluruh negara. Sementara negara yang lain juga telah bertindak untuk membatasi semua gerakan internal yang dianggap tidak urgen dan signifikan. Istilah ini disebut dengan istilah *lockdown*. Ketika virus COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Tiongkok pada akhir 2019, *lockdown* tampak seperti sebuah keputusan yang ekstrim (BBC, 2020).

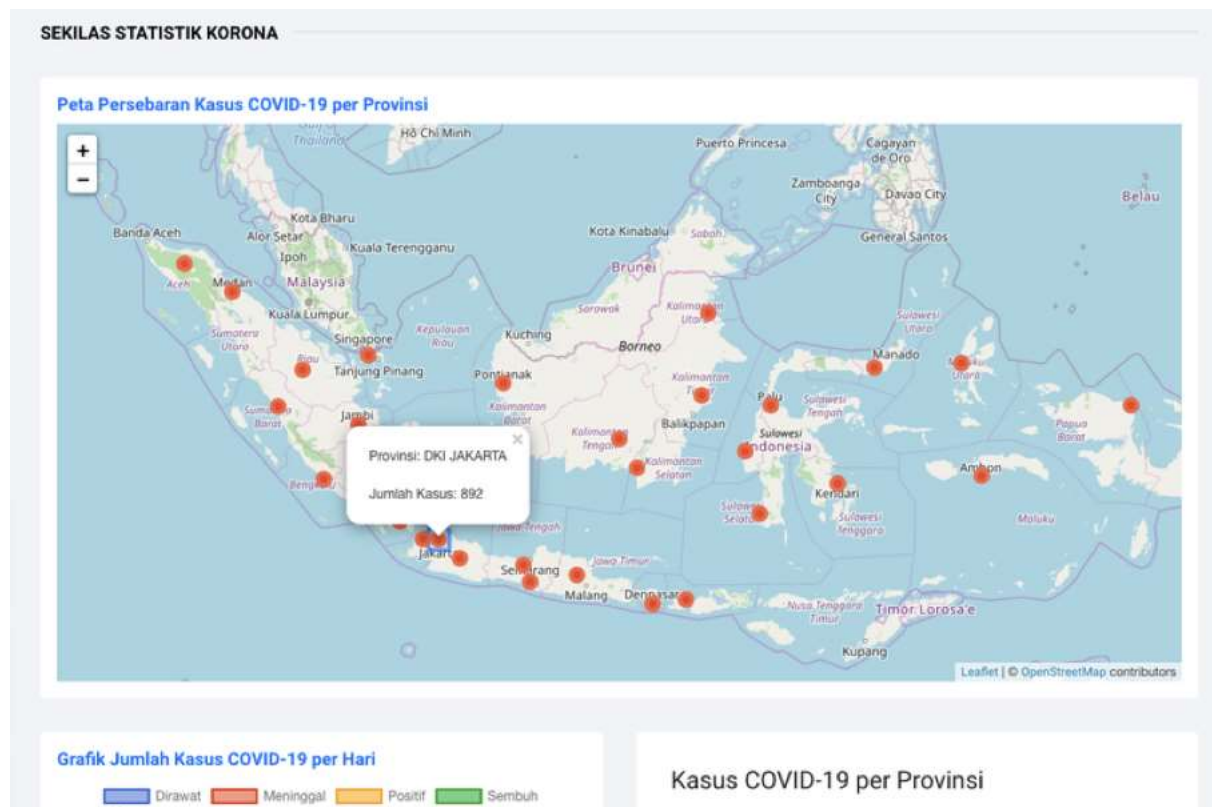
Hingga saat ini sepertiga populasi dunia hidup di bawah peraturan *lockdown* karena pandemi COVID-19. *Lockdown* sendiri memiliki Langkah-langkah dan interpretasi yang bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Seperti Tiongkok hanya menerapkan *lockdown* di

beberapa kota, sedangkan di Italia pemerintah telah memaksakan penduduknya untuk tinggal di rumah tanpa adanya batas waktu. India, Tiongkok, Perancis, Italia, Selandia Baru, Polandia, dan Inggris telah menerapkan tindakan *lockdown* terbesar dan paling ketat di dunia. Di Inggris warganya boleh meninggalkan rumah hanya untuk berolahraga sehari-hari atau berbelanja untuk keperluan penting seperti makanan dan obat-obatan. Peraturan ini akan ditinjau setelah tiga minggu dengan adanya kemungkinan untuk di perpanjangan (Higham, 2020).

Di Indonesia, para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah Indonesia mengambil langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai upaya untuk memutus mata rantai dari virus korona tersebut. Bagaimana maksud dan tujuan putusan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian akankah putusan PSBB ini memberikan dampak positif kepada negara dan masyarakat Indonesia khususnya. Dengan asumsi asumsi tersebut, maka tulisan dan riset ini nantinya akan berupaya menganalisa bagaimana keputusan PSBB bagi Indonesia melalui pendekatan konsep *Human Security* dan Maqosid Syariah.

### **Histori dan Perkembangan Pandemi covid 19 di Indonesia**

Covid-19 adalah sebuah virus yang sangat mematikan di dunia pada saat ini. Virus yang pada awalnya lahir di negara China di kota Wuhan. Virus yang diduga oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump ini mengungkapkan bahwa Virus Covid-19 ini berasal dari pasar hewan di kota Wuhan negara China, namun banyak yang menolak pernyataan ini dikarenakan pada awalnya belum ada bukti yang kuat dan akurat (liputan6, 2020). Virus ini awalnya hanya menyebar di kota Wuhan yang kemudian mulai meramba ke kota China lainnya bahkan mulai menyebar ke negara-negara lain, yang kemudian yang menjadikan virus ini berganti menjadi pandemi.



<https://www.kompas.com/tren/image/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia?page=1>

Setelah banyaknya penelitian terkait virus ini akhirnya terungkap bahwa virus ini memang berasal dari Wuhan, China yang berasal dari pasar hewan. virus ini berasal dari salah satu hewan yang di jual dan di konsumsi rakyat China, yaitu kelelawar. virus yang disebabkan oleh kelelawar ini menyebar dikarenakan rakyat China mengkonsumsi kelelawar yang memiliki virus ini lalu menyebar dari satu orang ke yang lainnya (Liputan6, 2020).

Virus ini bukan hanya mewabah di China saja melainkan di negara-negara lain termasuk negara kita yaitu Indonesia. Bahkan negara-negara maju juga terkena dampak dari pandemi ini dan sulit untuk menghilangkan Covid-19 ini. Dunia Pada saat ini sedang berusaha untuk melawan adanya Covid-19 yang sedang mewabah, dengan banyak cara salah satunya dengan Karantina mandiri, Lock down, dan negara Indonesia menggunakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Negara yang telah terpapar sangatlah banyak termasuk negara kita yaitu Indonesia. penyebaran pandemi ini sangat cepat sehingga negara yang jaraknya berjauhan dapat terjangkau Covid-19 ini. negara Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terjangkau Covid-19.

banyak cara yang dilakukan oleh negara-negara kecil maupun besar agar terhindar dari Covid-19 ini namun sangat sulit untuk menghindarinya. penularan Covid-19 ini terbilang sangat cepat menyebar yang menyebabkan negara-negara tidak siap untuk menghadapinya. ditambah lagi Covid-19 ini adalah virus atau wabah baru yang muncul pada tahun 2019 yang membuat semua negara panik (Febrian, 2020) .

Tanpa adanya persiapan negara maju dan juga berkembang mencari jalan agar terhindar atau bahkan bisa membebaskan diri dari Covid-19 ini. berbagai cara dilakukan dari tiap negara. negara-negara maju mulai melakukan Lock down yang bertujuan untuk penyebaran Covid-19. Lockdown ini dilakukan banyak negara dan dijaga sangat ketat agar banyak orang tidak dapat berkeliaran. tujuan lain dari adanya lockdown ini adalah agar Covid-19 ini tidak mudah menyebar ke orang-orang lainnya dikarenakan adanya pembatasan yang membuat masyarakat tidak dapat bertemu satu sama lain dan tetap berada di rumah.

banyak cara yang dilakukan oleh tiap negara untuk mengurangi penyebaran, namun mayoritas di tiap negara melakukan lockdown minimal selama 14 hari, lockdown dilakukan minimal 14 hari dikarenakan Virus ini susah untuk dideteksi oleh orang yang terserang penyakit ini. namun negara Indonesia juga melakukan banyak cara juga agar penyebaran Covid-19 ini dapat berangsur menurun salah satunya dengan cara lockdown mandiri di tiap daerah atau wilayah dan kemudian berganti menjadi PSBB di tiap daerah. PSBB ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana daerah yang menerapkan ini tidak dapat beraktifitas seenaknya dan disuguhkan dengan beberapa tata tertib yang berlaku di tiap daerah yang menggelar PSBB seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan kota lainnya.

### **Kebijakan PSBB di Indonesia**

Ketika Covid-19 mulai tersebar di seluruh dunia, banyak negara mulai mengambil kebijakan untuk menghentikan laju persebaran Covid-19 salah satunya dengan melaksanakan kebijakan Lockdown. Di Indonesia, untuk menghentikan persebaran Covid-19 di berbagai daerah, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Definisi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dibahas di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, menurut pasal 11 UU tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain membahas mengenai PSBB, UU ini juga membahas mengenai langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan laju persebaran Covid-19 yaitu karantina wilayah. Menurut pasal 10 undang-undang nomor 6 tahun 2018, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk

dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari WHO mengenai definisi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika sebuah negara memutuskan untuk menerapkan kebijakan Lockdown. Sehingga sulit untuk menilai diantara kedua opsi yang dimiliki oleh pemerintah, opsi manakah yang sesuai dengan system lockdown yang diterapkan oleh negara lain. Namun, jika dilihat dari pernyataan presiden Jokowi yang bersikeras tidak ingin menerapkan lockdown dan memutuskan menerapkan PSBB, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Karantina Wilayah adalah definisi lockdown menurut pemerintah Indonesia. Hal ini pun ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) RI, Prof. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa Lockdown lebih didefinisikan sebagai upaya karantina wilayah yang mengatur tentang pembatasan semua aktivitas lokal di suatu daerah baik meliputi kegiatan ibadah, sosial, pendidikan maupun ekonomi serta menghentikan distribusi logistik antar daerah (detikNews, 28 Maret 2020). Hal ini juga menjadi alasan presiden Jokowi yang tidak ingin menerapkan kebijakan lockdown karena tidak ingin menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di Indonesia yang akan berakibat buruk terhadap kestabilan negara sehingga lebih memilih menerapkan PSBB yang hanya membatasi beberapa kegiatan tertentu seperti pembatasan kegiatan ibadah, peliburan aktivitas pendidikan dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum tanpa menghentikan aktivitas ekonomi khususnya yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti pasar (Kompas.com, 2 April 2020).

Penerapan PSBB sendiri dilakukan dengan beberapa persyaratan dan mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Salah satu mekanisme yang dilaksanakan tertuang di dalam Pasal 3 Ayat yaitu pemerintah daerah baik melalui kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) maupun ketua gugus tugas hanya memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penerapan PSBB, sedangkan pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyetujui usulan tersebut. Dalam mengajukan usulan nya tersebut, pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang dijelaskan di dalam pasal 2 yakni tentang jumlah orang yang terinfeksi maupun meninggal diakibatkan oleh peningkatan dan persebaran penyakit tersebut secara signifikan dan harus mampu mempertimbangkan kaitan antara epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Selain melalui pertimbangan tersebut, daerah yang mengajukan PSBB juga harus menyertakan data mengenai peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu serta data mengenai kejadian transmisi local yang terjadi.

Ada beberapa perbedaan antara PSBB dan karantina wilayah seperti karantina wilayah secara tegas melarang setiap orang keluar dari zona wilayah tertentu sedangkan PSBB hanya membatasi jumlah kerumunan masa yang ada di wilayah yang sedang menerapkan kebijakan tersebut sehingga layanan umum dan strategis seperti layanan kesehatan, transportasi dan pusat perekonomian masih diizinkan beroperasi (Merdeka.com, 7 April 2020). Selain itu, di dalam

pasal 55 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wajib menanggung kebutuhan dasar manusia dan hewan ternak, sedangkan di dalam UU tersebut tidak tertulis adanya kewajiban yang sama bagi pemerintah pusat dan da tidak tertulis adanya kewajiban yang sama bagi pemerintah pusat dan daerah ketika PSBB hendak dilaksanakan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membahas mengenai penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan episentrum Covid-19 di Indonesia (Media Indonesia, 20 Maret 2020) dan Jawa Barat sebagai sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

### **PSBB DKI Jakarta**

DKI Jakarta menjadi provinsi yang pertama kali menerapkan PSBB pada tanggal 10 April 2020 dengan memberlakukan beberapa peraturan seperti pelarangan ojek baik konvensional maupun online untuk mengangkut penumpang sehingga ojek online yang beroperasi selama masa PSBB hanya diperbolehkan melakukan layanan delivery makanan maupun barang, restoran diperbolehkan tetap dibuka namun hanya bisa melayani pemesanan makanan yang kemudian dibawa pulang dan dilarang mengizinkan pelanggan untuk makan di tempat, mewajibkan hotel-hotel di Jakarta menerima tamu yang berniat melakukan isolasi diri secara mandiri yang dilengkapi dengan protokol kesehatan yang berlaku dan hanya mengizinkan olahraga di rumah dengan sendiri bukan berkelompok (DetikNews.com, 10 April 2020).

PSBB sendiri normal nya berdurasi 14 hari, namun pemerintah daerah bisa memilih rentang durasi PSBB yang akan dilakukan tergantung dengan kondisi daerah tersebut. Sebagai contoh nya PSBB yang dilaksanakan di DKI Jakarta, kebijakan ini telah diterapkan dalam 5 gelombang dengan rincian 3 kali PSBB dan 2 kali PSBB transisi (Viva.co.id, 1 Juli 2020). Gelombang pertama PSBB DKI Jakarta diterapkan sejak tanggal 10 hingga 23 April 2020, kemudian dilakukan perpanjangan waktu terhitung sejak tanggal 24 April hingga 21 Mei 2020. Gelombang ketiga dimulai pada 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Setelah selesai gelombang ketiga PSBB, pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil kebijakan PSBB transisi yang dilandasi dengan keadaan epidemiologis, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan yang mendapatkan skor masing-masing 75, 70 dan 100 dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dipimpin oleh ahli epidemiologi Pandu Riono (fokus.tempo.co, 5 Juni 2020). Hal ini dirasa layak karena pemerintah DKI Jakarta mendapatkan nilai rata-rata 76 yang merupakan nilai minimal untuk memulai new normal di era PSBB transisi.

Di masa transisi ini, aktivitas perkantoran dan rumah ibadah yang sebelumnya dilarang beroperasi akhirnya kembali dibuka dengan tetap memperhatikan beberapa protokol kesehatan seperti pembatasan maksimal 50% dari kapasitas yang ada dan tetap disiplin menggunakan masker. Selain itu, pusat perekonomian pun mulai menggeliat kembali dengan izin beroperasi yang diberikan oleh pemprov DKI Jakarta walaupun harus dilakukan secara bertahap seperti mengizinkan beroperasi nya layanan perkantoran, ojek online mulai diperbolehkan kembali

mengangkut penumpang, dibuka nya kembali pertokoan, retail dan showroom hingga izin untuk layanan pendukung di minggu pertama. Pada minggu kedua, UMKM binaan pemprov DKI Jakarta dan mal kembali diizinkan dibuka, yang kemudian disusul dengan izin dibuka kembali taman rekreasi indoor dan outdoor, kebun binatang hingga pantai di minggu ketiga masa PSBB Transisi (CNNIndonesia.com, 4 Juni 2020).

Masa PSBB transisi pertama berlangsung dalam kurun waktu 26 hari yang dimulai sejak tanggal 5 Juni dan berakhir 1 Juli 2020, setelah itu, pemerintah DKI Jakarta melakukan perpanjangan PSBB transisi selama 14 hari yang efektif berlaku sejak tanggal 2 Juli hingga 16 Juli 2020, hal ini dilansasi dengan skor 3 aspek utama yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat dan fasilitas public yang ada di posisi 71 dan memenuhi syarat diberlakukannya pelonggaran (megapolitan.kompas.com, 1 Juli 2020). PSBB transisi DKI Jakarta kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya dan berlaku selama 14 yang dimulai pada tanggal 16 hingga 30 Juli 2020 (CNNIndonesia, 16 Juli 2020). Ada sebuah peringatan keras yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh warga yakni ancaman untuk mencabut PSBB transisi dan kembali kepada kebijakan PSBB seperti yang dilaksanakan di awal-awal masa persebaran Covid-19 di DKI Jakarta jika terdapat peningkatan signifikan kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta (Liputan6.com, 19 Juli 2020). Hal ini didukung dengan penambahan kasus Covid-19 sebanyak 344 kasus pada 8 Juli 2020 yang merupakan lonjakan tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di DKI Jakarta dan lebih mencengangkan lagi hal ini justru terjadi di saat Pemprov DKI tengah menerapkan PSBB masa transisi (megapolitan.kompas.com, 9 Juli 2020).

### **PSBB Kawasan BODEBEK**

Berbeda dengan PSBB DKI Jakarta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat memulai kebijakan ini dengan penerapan PSBB di 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi sejak tanggal 15 hingga 28 April 2020 (Media Indonesia, 13 April 2020). Menurut Ridwan Kawil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, PSBB kawasan Bodebek dilakukan karena secara nasional 70% kasus Covid-19 di Indonesia pada saat itu berpusat di kawasan Jabodetabek sehingga langkah PSBB yang dilakukan oleh Jakarta harus diikuti oleh kabupaten/kota terdekat agar bisa menekan persebaran Covid-19 secara maksimal (Tirto.id, 8 April 2020).

PSBB kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) diterapkan dalam 7 gelombang berbeda sejak pertama kali Pemprov menetapkan kebijakan PSBB diberlakukan. Setelah selesai tahap pertama, Pemprov Jabar memutuskan untuk melanjutkan kembali PSBB di kawasan ini terhitung sejak tanggal 29 April hingga 12 Mei 2020, hal ini dilakukan karena Ridwan Kamil menilai bahwa PSBB ini cukup efektif menekan angka persebaran Covid-19 di wilayah penyangga ibukota hingga 38,5 % (Tribunnews.com, 28 April 2020). Selanjutnya, PSBB tahap 3 mulai diberlakukan sejak tanggal 13 hingga 26 Mei 2020 karena pemerintah daerah menilai PSBB mulai menunjukkan hasil yang memuaskan dengan penurunan angka persebaran Covid-



19 per hari dan peningkatan jumlah pasien sembuh, selain itu PSBB ini juga dianggap penting karena menjelang hari raya Idul Fitri terkadang pergerakan masa tidak bisa dihindarkan sehingga pemerintah daerah merasa perlu ada pengendalian dengan cara tetap menerapkan PSBB khususnya di kawasan Bogor (AyoBogor.com, 13 Mei 2020). Selanjutnya ada sedikit jeda pembaharuan waktu PSBB selama 4 hari, hal ini terlihat dengan penerapan PSBB Bodebek tahap 4 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2020 (pikiran-rakyat.com, 28 Mei 2020).

Tahap selanjutnya yang dimulai sejak 5 Juni hingga 2 Juli 2020 menitik beratkan kepada kebijakan PSBB Proporsional skala mikro yang mulai mengadaptasi kebijakan PSBB transisi yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang menitik beratkan pada peran aktif jajaran pemerintah dari tingkat provinsi hingga kelurahan serta memprioritaskan kelonggaran untuk kegiatan ibadah (humas.jabarprov.go.id). Setelah itu, kebijakan PSBB proporsional diperpanjang sejak 2 hingga 16 Juli 2020 karena kawasan Bodebek masih termasuk ke dalam kawasan Zona kuning (ayobandung.com, 1 Juli 2020). Setelah itu, PSBB Proporsional Berskala Mikro kembali diperpanjang sejak tanggal 18 Juli hingga 1 Agustus 2020 untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi serta Pemprov Jawa Barat melihat belum meredanya persebaran Covid-19 sebagai alasan lain untuk kembali memperpanjang PSBB Proporsional Berskala Mikro (megapolitan.kompas.com, 18 Juli 2020).

## **Hubungan Bilateral Indonesia dalam menangani covid 19**

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain tidak hanya terjadi dalam batas ekonomi atau keamanan saja, dalam era pandemi ini hubungan Indonesia dengan negara lain juga melibatkan dalam bidang kesehatan. Ada beberapa negara yang ikut membantu Indonesia dalam menangani pandemi ini

### **Rusia**

Hubungan bilateral antara Indonesia-Rusia sudah terjalin sejak era Uni Soviet. Hubungan ini meliputi kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan masih banyak lagi. Pada saat terjadinya pandemi ini Rusia membantu Indonesia dalam bidang kesehatan (Embassy, 2020).

Kerjasama dalam bidang kesehatan ini meliputi Kedutaan Besar Rusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada kerjasama ini Rusia berhasil mengirimkan obat-obatan yang bernama "Cycloferon" dan "Reamberin" ke Indonesia tepatnya di Jakarta yang akan berguna bagi perawatan pasien COVID-19. Obat ini juga berfungsi untuk pencegahan infeksi yang kemungkinan dapat menular ke tenaga medis, selain itu obat ini juga dapat meningkatkan tingkat pertahanan kekebalan tubuh. Bantuan medis ini diberikan ke Indonesia berasal dari perusahaan produsen farmasi yang berada di Rusia, perusahaan tersebut bernama "Polysan Ltd" (Embassy, 2020).

## Singapore

Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang erat di berbagai di berbagai sektor. Pihak Singapura telah membantu Indonesia pada saat pandemic ini baik dari sisi pemerintahan hingga pihak swasta, salah satunya adalah Yayasan Temasek Singapura yang memberikan sekitar 3 juta masker untuk Kepulauan Riau, TNI dan Polri. Ada sekitar 40.000 test kit berbasis RT PCR telah dibagikan ke Jakarta, Bali, dan Batam. Ada juga bantuan berupa *surgical masker* bagi para petugas medis untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Singapura dengan Yayasan Temasek juga telah melakukan kerja sama seperti memberikan kebutuhan dukungan non-medis Singapura untuk pembangunan sarana karantina, diantaranya 25 ribu set dipan dan kasur, pembelian *reusable mask* dan lain-lain (Kemenlu, 2020).

Dengan kerjasama ini diharapkan nantinya pemenuhan kebutuhan alat kesehatan bisa ditanggulangi melalui kerja sama yang memanfaatkan potensi masing-masing negara. Hal ini juga didukung oleh Kedutaan Indonesia di Singapura yang menawarkan adanya pengadaan kebutuhan (*non-medical essential*) yang dibutuhkan oleh Singapura serta menjalin kerjasama untuk memproduksi *medical supply* di Indonesia. (Kemenlu, 2020).

## Republik Rakyat Tiongkok

Presiden Xi mengatakan bahwa komitmen Tiongkok untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi pandemi COVID-19 ini ditunjukkan dengan adanya bantuan sejumlah alat medis yang terdiri dari alat tes corona, masker N95, masker bedah, pakaian pelindung medis, dan ventilator portabel. Bantuan ini diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berguna untuk pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Tiongkok sering menawarkan bantuan alat medis melalui berbagai sektor untuk membantu Indonesia melawan pandemi ini (CNN, 2020). Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengirimkan peralatan medis lagi. (Pinandita, 2020).

## Korea selatan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima bantuan dari pihak Korea Selatan yang berupa peralatan medis, peralatan pelindung dan peralatan pengujian ke Indonesia yang berguna untuk membantu negara melawan COVID-19. Pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk memberikan bantuan berbentuk barang senilai dengan US \$ 500.000 kepada Indonesia, seperti kit uji COVID-19 dan penyemprot daya yang dapat diisi ulang, dengan jumlah sekitar 300 unit. The Korea International Cooperation Agency (KOICA) telah dipercaya untuk mengkoordinasi pengiriman tersebut (Prasidya, 2020).

Perusahaan besar Korea Selatan seperti LG Group, Hyundai Motor Corporation, dan CJ Group juga ikut serta dalam membantu Indonesia dalam melawan Pandemi ini seperti LG Group yang membantu sekitar 50.000 test kit COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) ke Indonesia, ada juga Hyundai melalui Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) berkomitmen memberikan 50.000 set alat pelindung diri (APD), seperti masker dan baju pelindung, senilai dengan Rp 8,2 miliar secara bertahap untuk pekerja medis (Prasidya, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Konsep

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan dua konsep yang berbeda. Kedua konsep yang penulis kaji pada penelitian ini adalah *human security* dan maqashid syariah. Pada dua konsep ini terdapat kesamaan untuk menjadi acuan dalam meneliti kasus putusan PSBB pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemic covid 19 di Indonesia. Dengan adanya dua konsep yang berbeda ini penulis mencoba untuk melihat Bagaimana analisis *human security* dan maqosid syariah melihat putusan PSBB pemerintah Indonesia memutus mata rantai pandemi COVID-19.

- **Konsep *Human security***

Pendekatan *Human security* diperkenalkan dalam Laporan *Human Development Report* (HDR) 1994, yang mengarah pada berbagai literatur dan inisiatif yang membangun sebuah gagasan, dan ke serangkaian diskusi di PBB. Pada 2012 *General Assembly* (GA) mengadopsi definisi umum dari konsep tersebut.

Pendekatan *Human security* memperbesar jangkauan analisis dan kebijakan terkait dengan keamanan yang berasal dari keamanan teritorial ke keamanan manusia. Resolusi GA 2012 menyatakan bahwa peran "Negara-negara Anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang luas dan lintas sektoral untuk bertahan hidup, kemungkinan hidup, dan martabat rakyat mereka". Dengan kata lain, adanya ancaman terhadap manusia dan nilai-nilai yang terancam di dalam nyawa manusia adalah titik awal dari sebuah laporan *Human security* (Gomez, 2004).

HDR 1994 memperhatikan dua komponen utama pada *Human security* yaitu 'kebebasan dari rasa takut' dan 'kebebasan dari keinginan'. Kebebasan ini, di mulai dari pembukaan hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan bagian dari keempat kebebasan manusia yang pernah disebut dalam pidato Presiden Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 (Gomez, 2004).

HDR 1994 lebih spesifik, mendaftar tujuh dimensi penting dari keamanan manusia:

- A) *Economic security*
- B) *Health security*
- C) *Personal security*
- D) *Political security*

- E) *Food security*
- F) *Environmental security*
- G) *Community security*

Tabel di bawah ini menunjukkan Kemungkinan Jenis Ancaman terhadap *human security* (UNDP, 1994)

Jenis-jenis keamanan	Contoh Ancaman Utama
<i>Economic security</i>	Kemiskinan yang terus-menerus, pengangguran
<i>Health security</i>	Penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, kekurangan akses ke perawatan kesehatan dasar
<i>Personal security</i>	Kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, anak tenaga kerja
<i>Political security</i>	Represi politik, pelanggaran HAM
<i>Food security</i>	Kelaparan, paceklik
<i>Environmental security</i>	Degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, alam bencana, polusi
<i>Community security</i>	Ketegangan antar-etnis, agama dan identitas lainnya

*Human Development* dan *Human Security* saling terkait tetapi sama sekali tidak identik. *Human development* adalah konsep luas, yang bertujuan memperbesar pilihan dan kebebasan orang. *Human security* adalah tentang memastikan kebebasan prioritas sehingga 'orang dapat melakukan pilihan dengan aman dan bebas' dan yakin bahwa peluang yang mereka miliki dilindungi (Gomez, 2004). Dalam item ini kami menggunakan pendekatan *economic security* dan *health security*

- **Konsep Maqoshid Al-syari'ah**

Konsep Maqoshid Al-Syari'ah ini memiliki arti tujuan atau maksud. Teori Maqoshid Al-syari'ah ini adalah teori yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam. yang dimana pada teori ini membahas apa saja yang penting di dalam hukum Islam. Teori ini muncul dari banyaknya perhatian dari Ulama dan juga pakar hukum Islam. Sebagian

ulama juga menempatkannya dalam pembahasan ushul fiqh, dan juga ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. kemudian larangan atau perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an serta ajaran Nabi Muhammad SAW ini masuk kedalam fiqh dan semua memiliki tujuan yang berbeda, namun tujuan di dalamnya pun bertujuan baik dan tidak ada yang bertujuan buruk.

Tokoh Maqoshid Syari'ah ini adalah Nabi Muhammad SAW, Sahabat Nabi, Tabi'en, Imam Syatiby, dan Jaser Auda. Teori Maqoshid merupakan tujuan penting dalam memerani Islam. para ahli menjadikan Maqoshid ini sebagai Teori yang bertujuan untuk kebaikan. banyak tujuan lain pada teori ini Maqashid al-syari'ah di dalam konteks maqashid al-syari' terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Teori Maqoshid pada penelitian ini digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan PSBB, dikarenakan pandemic covid 19 sudah mengglobal dan menjadikan *concern* bagi jutaan mata dunia internasional. Sehingga virus covid 19 ini menjadikan diskursus, polemik serta marak diperbincangkan dalam studi hubungan lintas negara (International Relations) khususnya mengenai putusan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Menurut Imam Syatiby, salah satu tokoh/ilmuan yang expert dalam bidang Maqoshid, ada beberapa poin yang dapat diklasifikasikan dalam teori Maqoshid yaitu sebagai berikut:

1. Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan yang utama bagi hukum Islam. Oleh karena itu adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim beserta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim.

2. Jiwa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau pun kehancuran.

3. Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk

lainnya. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalinya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa mana, merasakan kedamaian dan ketenangan dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketegangan. Manusia pun merasakan aman aras harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka. Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilikinya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan unta; sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali.

4. Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dan tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

5. Keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, Tuduhan atas perzinahan, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melakukannya larangannya. Bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

Maqashid Syariah sendiri cukup jarang digunakan dalam meneliti sebuah permasalahan yang terjadi akibat adanya pandemi, lebih banyak ditemukan penggunaan maqashid syariah dalam membahas permasalahan sosial (Shidiq, 2009). pada konsep ini kita memakai konsep agama dan jiwa dalam menganalisis t

### **Analisis PSBB Melalui Teori *Human Security***

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya Covid-19 mulai tersebar di seluruh dunia, banyak negara mulai mengambil kebijakan untuk menghentikan laju persebaran Covid-19 salah satunya dengan melaksanakan kebijakan Lockdown. Di Indonesia, untuk menghentikan persebaran Covid-19 di berbagai daerah, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19). Maka dari itu penulis akan menganalisis kebijakan PSBB ini dengan menggunakan indikator *economic security* dan *health security*.

- ***Economic security***

Indonesia menerapkan PSBB karena banyaknya tuntutan yang membuat pemerintah berdiskusi untuk menerapkan peraturan baru agar masyarakat tetap bisa menjalani aktifitas

seperti biasa namun dengan protokol Covid yang berlaku. PSBB dirancang oleh pemerintah agar masyarakat tetap merasa aman. Pemerintah juga menerapkan PSBB dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa dalam situasi covid mereka sulit untuk mendapatkan uang dan sulit bertahan di situasi seperti ini. Keuangan semakin menurun yang menyebabkan masyarakat kebingungan untuk membeli makan dan kebutuhan rumah. Namun dengan begitu banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya PSBB ini mampu memulihkan lagi perekonomian mereka.

Dikarenakan banyaknya penurunan perekonomian di Indonesia yang disebabkan oleh Covid ini, pemerintah memikirkan banyak cara agar semua bisa stabil dan berjalan layaknya perekonomian semasa sebelum adanya pandemi ini. Akibat banyaknya keluhan kesah dari masyarakat dan bahkan sangat berdampak besar bagi perekonomian Pemerintah memilih untuk menjalankan program yang dinamakan PSBB yang memiliki tujuan agar perekonomian Indonesia dapat stabil kembali. Seiring berjalannya PSBB ini perekonomian Masyarakat Indonesia mulai menaik dikarenakan dengan adanya PSBB masyarakat sudah diperbolehkan beraktifitas, berjalan, dan bekerja seperti sedia kala namun dengan tata tertib yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa dengan adanya PSBB ini dapat menaikkan perekonomian masyarakat Indonesia kembali. Yang pertama, banyaknya pengakuan dari masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya PSBB mereka mampu menaikkan perekonomian. Kedua, adanya bantuan dari pemerintah berupa sembako, pengurangan uang listrik dan masih banyak lainnya. Namun Dengan adanya Covid ini masyarakat Indonesia memiliki banyak ide untuk menaikkan perekonomiannya salah satunya dengan berjualan masker, cairan anti virus dan lainnya yang mampu membantu perekonomian mereka.

Dengan diterapkannya PSBB ini terbukti mampu menaikkan perekonomian masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat mampu bekerja seperti biasa namun dengan ketentuan yang telah diberikan pemerintah seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan ke masyarakat salah satunya sembako dan pengurangan pembayaran listrik dimasa pandemi ini. Banyak negara yang juga membantu negara Indonesia dengan cara mengirimkan beberapa bantuan berupa APD, masker dan lainnya.

- *Health security*

Indonesia menerapkan PSBB tetap dengan peraturan yang ketat agar tidak adanya penularan dan tidak bertambah. Protokol Covid yang dibuat agar masyarakat tetap mematuhi peraturan agar menghindari penularan. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Bahkan sampai saat ini di beberapa tempat selalu ada pengecekan suhu tubuh.

Dengan adanya PSBB ini beberapa daerah mampu banyak mengurangi pasien Covid-19 Dikarenakan masyarakat patuh dalam menjalani protokol kesehatan. Dengan begitu Indoensia

banyak penurunan penularan dan juga banyak pasien yang sembuh dari virus dikarenakan penanganan yang baik dari rumah sakit.

Pemerintah Indonesia juga membeli vaksin Covid-19 yang bernama Sinovac dari Tiongkok yang berjumlah 1,2jt dosis dan pada bulan Januari Indonesia akan mendatangkan lebih banyak vaksin yang kurang lebih berjumlah 1,8jt dosis. Kemudian pemerintah juga ingin mendatangkan bahan baku vaksin dari Sinovac berjumlah 15jt dan pada Januari 2021 Indonesia akan mendambah 30jt dosis yang akan di proses lebih lanjut oleh Biofarma dan departemen kesehatan Republik Indonesia. Dengan begitu pemerintah Indonesia banyak berusaha untuk menangani Covid-19 dan bertanggung jawab atas penanggulangan Covid yang terjadi di Indonesia (Kusumo, 2020).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan memberikan Vaksin gratis kepada kota-kota yang berzona merah dimana kota tersebut memiliki jumlah pasien terjangkit Covid sangat banyak dan juga akan memberikan vaksin kepada masyarakat yang memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang berkelas tinggi. Membuktikan bahwa pemerintah Indonesia banyak membantu untuk penanganan pasien terjangkit Covid-19 (Farisa, 2020).

### **Analisis PSBB Melalui Konsep Maqoshid Al-syari'ah**

Indonesia mendapatkan banyak bantuan dari beberapa negara yang mengirimkan banyak bantuan berupa alat medis seperti APD, kasur untuk memadai rumah sakit, dan beberapa obat-obatan yang mampu meredakan gejala. Selain itu Indonesia juga banyak bekerja sama dan banyak mendapatkan bantuan dari negara-negara lain dalam menangani Covid-19.

- ***Hifdz Al-Din***

Selana penerapan PSBB, pemerintah Indonesia melarang pelaksanaan sholat berjamaah di masjid khususnya yang berlokasi di daerah yang rentan terhadap persebaran Covid-19. Hal ini kemudian diganti dengan pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah di rumah dan mengganti sholat Jum'at dengan sholat zuhur. Selain itu, selama bulan Ramadhan di tahun 2020, kegiatan tarawih yang biasa dilaksanakan di masjid pun dilarang oleh pemerintah dan menganjurkan masyarakat untuk sholat tarawih berjamaah bersama keluarga.

Selain kegiatan sholat berjamaah, pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pun harus dibatalkan baik pembatalan oleh pemerintah Arab Saudi maupun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi membatalkan haji karena khawatir terhadap persebaran Covid-19 di negara tersebut jika jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Mekah dan Madinah (Sinaga, 2020). Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Arab Saudi dengan menerapkan haji terbatas bagi para ekspatriat yang telah



bermukin di negara tersebut (Prabowo, 2020). Salah satu alasan pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jamaah haji adalah persiapan yang sangat mepes sehingga mustahil pemberangkatan dilakukan (Fanani, 2020).

Pelarangan sholat berjamaah di masjid dan pembatalan haji tahun 2020 (1441 H) merupakan kebijakan yang sangat bersinggungan dengan prinsip *Hifdz Al-Din* di dalam konsep *Maqoshid Syariah*. Meskipun *Hifdz Al-Din* merupakan pilar utama dalam *Maqoshid Syariah*, namun pelaksanaan sholat di rumah dalam kasus ini dimaklumi karena hadir nya sebuah uzur yakni wabah Covid-19. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW., “Sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya (pergi ke masjid) maka tidak sempurna shalatnya, kecuali disebabkan keudzuran”. Hadist ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat berjamaah di masjid bisa dimaklumi jika terdapat udzur dan ketakutan bagi seseorang.

Pelarangan sholat berjamaah di masjid juga merupakan sebuah *ikhtiar* yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan pilar *Hifdz al-Nafs* untuk menghindarkan manusia dari wabah penyakit yang bisa mengancam nyawa mereka. Kebijakan ini tidak menandakan bahwa nyawa lebih penting dari agama, justru menunjukkan bahwa memelihara nyawa adalah salah satu bagian dari agama.

- ***Hifdz al-Nafs***

*Hifdz al Nafs* merupakan sebuah teori yang sangat beririsan dan saling bersinggungan dengan *Health Security*. Namun salah satu perbedaan dari kedua pilar tersebut adalah *Health Security* hanya menyinggung tentang hilangnya nyawa seseorang karena hadirnya sebuah wabah penyakit. Sedangkan, *Hifdz al Nafs* juga menyinggung tentang upaya penghilangan nyawa baik melalui pembunuhan maupun bunuh diri.

Dalam konsep *Hifdz Al-Nafs*, pelarangan aktivitas di luar rumah serta penerapan PSBB secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah *ikhtiar* yang tepat untuk melindungi nyawa setiap manusia. Walaupun dalam penerapannya, sering kali terjadi kesalahan sehingga *ikhtiar* tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Seperti yang telah disinggung di poin sebelumnya, upaya PSBB merupakan sebuah usaha pemerintah untuk menjamin keselamatan warga walaupun hal ini belum diterapkan secara efektif.

## PENUTUP

Upaya pemerintah mengambil langkah PSBB merupakan sebuah contoh yang sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” Hal ini menandakan hadirnya upaya

penanggulangan persebaran Covid-19 oleh pemerintah yang disebabkan oleh aktivitas keluar masuk suatu wilayah.

Dengan demikian jika ditinjau dari konsep Human Secirty dan Maqosid dalam penerapan PSBB menyikapi covid 19 sangat relevan dan tepat bagi pemerintah dalam melindungi warganya baik yang mencakup dibidang ekonomi, politik, social, kesehatan dan agama.

#### **SARAN**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dimasa yang akan datang ada penelelitian yang sejenis yang bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam mensikapi wabah yang menggolbal dikemudian hari. Bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah dalam mensikapi wabah tersebut. Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari aspek ekonomi, politik, social, kesehatan dan agama.

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 04 No: 01 Tahun: 2022

" PUTUSAN PSBB PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PANDEMIC COVID-19 TH 2020 MELALUI PENDEKATAN HUMAN SECURITY DAN MAQASHID"

Willi Ashadi, Ari Nugroho Kartika Nasution, Devina Floreansia, Ahmad Priansyah

Halaman: 24-43

---

## DAFTAR PUSTAKA

aljazeera. *Timeline: How the new coronavirus spread*. Diakses di :

<https://www.aljazeera.com/news/2020/01/timeline-china-coronavirus-spread-200126061554884.html>. Diakses pada tanggal : 23 maret 2020.

BBC. *Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts*. Diakses di :

<https://www.bbc.com/news/world-52103747> . Diakses tanggal : 24 maret 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

file:///C:/Users/PC/Downloads/7968-22047-1-PB.pdf

CNN. *Bantuan Medis Corona dari China Tiba di Indonesia*. Diakses di :

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200328213252-113-487878/bantuan-medis-corona-dari-china-tiba-di-indonesia> . Diakses pada tanggal : 22 july 2020

Embassy, Russia. *About anti COVID-19 medicines donated by Russia - News*. Diakses di :

<https://indonesia.mid.ru/web/eng/-/about-anti-covid-19-medicines-donated-by-russia?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Feng> . Diakses pada tanggal : 21 july 2020

Gomez, Oscar A. and Des Gasper . (2004) . *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams* . Hal. 2-3

Higham, Aliss . *Coronavirus travel: Latest list of countries on lockdown* . Diakses di :

<https://www.express.co.uk/news/world/1262677/Coronavirus-travel-full-list-countries-on-lockdown> . Diakses pada tanggal 24 maret 2020.

Kemenlu. *Kerja Sama Indonesia dan Singapura dalam Hadapi COVID-19* . Diakses di :

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1233/berita/kerja-sama-indonesia-dan-singapura-dalam-hadapi-covid-19> . Diakses Pada tanggal : 23 july 2020 .

Pinandita, Apriza . *China reiterates commitment to help Indonesia win fight against COVID-19* .

Diakses di : <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/04/china-reiterates-commitment-to-help-indonesia-win-fight-against-covid-19.html> . Diakses pada tanggal : 21 july 2020 .

Prasidya, Yunindita . *Emergency aid from South Korea reaches virus-crippled Indonesia* .

Diakses di : <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/emergency-aid-from-south-korea-reaches-virus-crippled-indonesia.html> . Diakses pada tanggal : 22 july 2020

UNDP . (1994) . *Human Development Report 1994* . Diakses di :

<https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Sec>

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 04 No: 01 Tahun: 2022

" PUTUSAN PSBB PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PANDEMIC COVID-19 TH 2020 MELALUI PENDEKATAN HUMAN SECURITY DAN MAQASHID"

Willi Ashadi, Ari Nugroho Kartika Nasution, Devina Floreansia, Ahmad Priansyah

Halaman: 24-43

---

[urity%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf](#) .

Diakses pada tanggal : 25 maret 2020

WHO. *Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic* . Diakses di :

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> . Diakses pada tanggal : 23 maret 2020.

Young, B., & Hren, D. (2017). *Introduction to Qualitative Research Methods*. Liverpool: Miror: Method in Research on Research.

Nindiyati, D.P. (2016). DAMPAK PENYEBARAN VIRUS EBOLA DALAM PERSPEKTIF HUMAN SECURITY DI AFRIKA. UT-Faculty of Social and Political Sciences.

Soedirham. O (2007). HIV/AIDS SEBAGAI ISU HUMAN SECURITY. *Journal Unairjournal.unair.ac.id*

Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 128. Sekretariat Negara. Jakarta

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown?page=all>

<https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/30/banyak-desakan-lockdown-cegah-virus-corona-jokowi-tegaskan-keputusan-ada-di-pemerintah-pusat>

<https://news.detik.com/internasional/d-4946313/lockdown-diterapkan-di-wuhan-who-akui-keberhasilan-china-atasi-corona>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all>

<https://www.kompas.com/global/read/2020/04/21/161320370/setelah-china-15-negara-ini-juga-mulai-longgarkan-lockdown?page=all>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/03/110948823/update-corona-3-april-1018845-kasus-di-204-negara-213542-semuh?page=all>

<https://kumparan.com/kumparannews/lockdown-di-20-negara-siapa-yang-paling-efektif-atasi-virus-corona-1tAbSa54tHu/full>

Khulasah : Islamic Studies Journal

E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578

Volume: 04 No: 01 Tahun: 2022

" PUTUSAN PSBB PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PANDEMIC COVID-19 TH 2020 MELALUI PENDEKATAN HUMAN SECURITY DAN MAQASHID"

Willi Ashadi, Ari Nugroho Kartika Nasution, Devina Floreansia, Ahmad Priansyah

Halaman: 24-43

---

<https://news.detik.com/berita/d-4956587/memahami-lagi-arti-lockdown-covid-19-dan-pandemi>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200330171435-20-488372/ada-negara-gagal-lockdown-corona-ri-tegas-tak-akan-terapkan>

<https://tirto.id/lockdown-india-sebabkan-kekacauan-apa-yang-terjadi-eJVG>

<https://video.tribunnews.com/view/138227/setelah-jakarta-pemerintah-terapkan-psbb-di-bogor-depok-dan-bekasi>

<https://kumparan.com/kumparannews/cerita-pilu-karyawan-harus-ngantor-saat-psbb-kalau-wfh-gaji-dipotong-atau-phk-1tDirNWARJT/full>

<https://www.liputan6.com/news/read/4244241/menelusuri-asal-muasal-munculnya-virus-corona-covid-19>

<https://bali.idntimes.com/health/medical/denny-adhietya/asal-muasal-dan-perjalanan-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia-regional-bali/1>

<https://www.kompas.com/tren/image/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia?page=1>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207083828-4-207235/good-news-dari-pak-jokowi-welcome-12-juta-vaksin-sinovac>

[https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/16/13564701/jokowi-vaksin-covid-19-gratis-untuk-masyarakat?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFAQrABIA%3D%3D#aoh=16082965080723&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/16/13564701/jokowi-vaksin-covid-19-gratis-untuk-masyarakat?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFAQrABIA%3D%3D#aoh=16082965080723&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s)